

## TANTANGAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANERAAAN DI TENGAH ARUS GLOBALISASI

**Barno**

Universitas Pamulang.  
[barno555@gmail.com](mailto:barno555@gmail.com)

Naskah diterima: 15-12-2024, direvisi: 18-12-2024, disetujui: 30-12-2024

---

### Abstrak

---

Integrasi dalam berbagai latar belakang sosial merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan antarindividu dan kelompok, yang pada akhirnya menjadi modal sosial utama untuk menciptakan warga negara yang baik. Di tengah keberagaman yang ada, modal sosial ini menjadi fondasi bagi terciptanya hubungan harmonis yang memperkuat persatuan nasional. Di sisi lain, globalisasi memberikan tantangan tersendiri. Fenomena ini memanjakan masyarakat dengan kemudahan akses terhadap berbagai kepentingan pribadi, terutama di Indonesia, negara dengan keragaman budaya, agama, dan sosial yang tinggi. Globalisasi membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai kewarganegaraan. Perubahan yang dihadirkan oleh globalisasi sering kali menggeser nilai lokal dan memunculkan tantangan baru dalam proses pembangunan bangsa. Hal ini menjadi refleksi bahwa Indonesia, meskipun dikenal sebagai negara besar dan kaya, dihadapkan pada fenomena perubahan yang tidak dapat dihindari. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis sebagai sarana pembinaan warga negara yang bermakna. PKn harus mampu menjawab tantangan ini dengan menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan yang relevan di era globalisasi. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang tidak hanya sadar akan hak dan kewajiban, tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan global tanpa melupakan identitas kebangsaan. Dengan demikian, PKn dapat menjadi alat untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, menjunjung tinggi keberagaman, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan di tengah derasnya arus globalisasi.

**Kata Kunci:** Globalisasi Indonesia, Sosial, Pendidikan Kewarganegaraan

## **PENDAHULUAN**

Memasuki era globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negaranegara sibuk menyesuaikan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikannya. Hal inilah yang menjadi tuntutan pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kemampuan kewarganegaraan di era global. Saling ketergantungan dan interkoneksi yang meningkat dalam 'global' dan keragaman yang terus meningkat di Negara-Bangsa memaksakan persyaratan khusus pada konsep kewarganegaraan dan kualifikasi akademik yang ada. Dalam latar belakang kebangsaan dalam menghadapi era globalisasi, perlu giat belajar, menghayati, dan mengamalkan landasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai Negara yang tidak bisa lepas dari pengaruh globalisasi, Indonesia harus berperan dalam proses tersebut. Karena akan terjalin kerjasama yang dapat meningkatkan perekonomian nasional serta mempererat, dan memperkuat hubungan antar Negara. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan tidak terlepas dari trend global yang mempengaruhi kehidupan manusia, karena pendidikan kewarganegaraan adalah tentang pendidikan kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara.

Globalisasi terminologi adalah perubahan sosial yang telah membawa perubahan luar biasa keseluruhan tatanan kehidupan. Dengan pena kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk watak kewarganegaraan yang dapat ditransformasikan menjadi pemeliharaan dan pengembangan publisitas yang demokratis.

Dalam era globalisasi, landasan urgensi pendidikan kewarganegaraan dapat dibagi menjadi dua perspektif, yang satu tantangan dan yang lainnya adalah tantangan ketika budaya banyak menimbulkan ancaman bagi budaya lokal dan nasional, itu juga merupakan peluang karena akses yang mudah di era globalisasi, tindakan juga mempengaruhi cara "amunisi" disiapkan.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan yang ada di Indonesia saat ini, kita juga harus memperhatikan dari perspektif logika sosial. Elemen sosiologis global dalam perkembangan globalisasi berdampak pada perkembangan sosial budaya masyarakat. Dari aspek sosial budaya masyarakat hingga pembangunan Negara, model pembangunan penyelenggaraan pemerintah nasional dalam sistem pemerintahan terus membuahkan hasil.

Salah satu cara untuk meningkatkan nasionalisme adalah dengan memberikan dengan sungguh pendidikan kewarganegaraan. Yang terpenting di dalam pendidikan kewarganegaraan bukan lagi teori melainkan lebih ke penanaman rasa nasionalisme yang dapat direalisasikan di kehidupan sehari-hari, misalnya dengan saling menghargai teman dan menghargai pendapat masing-masing. Dengan bekal penanaman nasionalisme, perbedaan suku, ras, dan agama tidak dipandang sebagai hambatan melainkan perbedaan itu melengkapi satu sama lain. Dimana orang tidak menjatuhkan satu sama lain demi kepentingan pribadi.

Rasa cinta tanah air yang mulai pudar menimbulkan kekhawatiran dari banyak pihak. Banyak masalah baru yang muncul di tanah air akhir-akhir ini. Dengan mudarnya rasa nasionalisme dapat menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia mudah dijajah. Penjajahan tidak lagi dalam bentuk fisik melainkan bisa dalam bentuk mental. Penjajahan mental jauh lebih mematikan dari pada penjajahan fisik. Oleh sebab itu masihkah kita akan menutup dari memupuk rasa nasionalisme? Masihkah kita mengabaikan pendidikan kewarganegaraan? Masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kita.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dilakukan oleh penulis menggunakan studi literatur. Dengan mencari berbagai bahan tertulis, baik itu buku, artikel, dan jurnal yang relevan. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memperkuat argument yang ada. Studi literature ini dilakukan oleh peneliti setelah menentukan topik penelitian dan merumuskan masalah, kemudia mengumpulkan data yang diperlukan saat itu juga.

Bagi saya kajian teori adalah suatu konsep yang dapat dibentuk secara sistematis, yang dapat diartikan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jika teori tersebut dapat menjelaskan atau mendeskripsikan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan nyata, maka teori tersebut akan menjadi sangat penting.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki arti sebagai sarana pendidikan karakter yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan warga negara yang cerdas dan baik dalam jalur pendidikan formal, informal dan nonformal yang telah menjadi bagian dari tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Harmanto (2013, h. 231) menjelaskan: "Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan yang sangat penting dalam membangun mentalitas, sikap dan perilaku yang harmonis, damai dan toleran tanpa meninggalkan keberagaman yang dianugerahkan oleh negara Indonesia". Harmoni, perdamaian dan toleransi, perkembangan sikap dan perilaku akan menjadi lawan dari segala bentuk konflik dan kekerasan. Jika pendidikan kewarganegaraan di era sekarang dapat memainkan peran tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan merupakan satu-satunya mata pelajaran yang dapat mencapai tujuan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, pendidikan kewarganegaraan Indonesia memiliki berbagai tujuan dalam pembentukan peradaban khususnya dalam pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan kegiatan pembelajaran yang harus diterima di semua jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan dasar, serta perguruan tinggi dan universitas.

Ubedillah dan Rozak (2013) mengemukakan bahwa sebagai sarana pembinaan karakter bangsa, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menumbuhkan keterampilan partisipasi warga negara yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Mewujudkan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 3. Membangun masyarakat yang beradab Budaya demokrasi, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan dan kedudukan yang penting dalam pembentukan karakter bangsa, oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pencapaian tujuan bangsa, khususnya dalam pendidikan kehidupan berbangsa. Pada dasarnya peran pembentukan karakter bangsa tidak hanya menjadi tugas pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga pemerataan disiplin ilmu lain, serta pendidikan. Hal ini menjadi kendala dalam pendidikan kewarganegaraan (Pipit Widiatmaka) 191 Warga negara memiliki beban moral terbesar, karena pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan moral negara.

Menurut Branson (Winaputra dan Budimansyah 2007:185) visi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mewujudkan masyarakat demokratis. Misi pendidikan kewarganegaraan dapat dikembangkan, merupakan tema yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang cerdas, baik, dan bertanggung jawab bagi keberlangsungan pemerintah yang demokratis. Wawasan pendidikan demokrasi untuk membutuhkan siswa yang setia membela Negara dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(Maftuh:2008) mengemukakan bahwa bangsa Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan nilai dasar dan ideologi Bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan tersebut meliputi (1). Pengamalan nilai-nilai Pancasila masih belum diimplementasikan secara maksimal di masyarakat. Selain itu,(Bunyamin Maftuh 2008) menyatakan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila hanya bersifat simbolik. (2). Kehidupan masyarakat Indonesia, terutama kehidupan generasi muda, sangat dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai luar. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai budaya lokal. (3). Selain sikap dan perubahan budaya terkait dengan perubahan nilai-nilai lokal, nilai-nilai kebangsaan juga mengalami penurunan, terutama di kalangan generasi muda. (4).

Perkembangan pemahaman agama meyakini bahwa universalisme lebih penting dari pada negara bangsa Indonesia. Ideologi ini juga menolak ide demokrasi dan biasanya berkembang di kalangan pelajar. (5). Dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila (termasuk integrasi nilai-nilai kebangsaan ke dalam negara Indonesia), peran lembaga pendidikan formal dan nonformal belum maksimal (Bunyamin Maftuh 2008).

Globalisasi merupakan fenomena khusus dalam peradaban manusia bergerak maju, dalam masyarakat global adalah bagian dari proses manusia global. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi semakin cepat mempercepat proses globalisasi. Dampak globalisasi ini juga berdampak pada pendidikan di Indonesia.

Pengertian globalisasi menurut bahasa adalah Global dan sasi, yang berarti Global adalah mendunia, dan Sasi merupakan sebuah proses, oleh karena itu definisi globalisasi berdasarkan bahasa digabungkan menjadi sebuah "Proses dari sesuatu". Kemunculan kata globalisasi sebenarnya adalah sebuah kata yang dipinjam dari bahasa asing, yaitu "globalization" dalam bahasa Inggris (Theodore Levitte :1986).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perubahan global yang terjadi dengan cepat dan multi dimensional, telah menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia, tidak hanya untuk menghalau perubahan tersebut, tetapi juga mengubahnya menjadi peluang. Globalisasi telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan hilangnya nilai budaya bangsa. Oleh karena itu penting untuk "mengembalikan" nilai-nilai luhur Negara Pancasila dan UUD 1945.

Setelah 72 tahun kemerdekaan Indonesia, politik Negara telah mengalami pergantian rezim. Dimilenium ini, Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan beragam. Tantangan tidak hanya muncul pada satu aspek kehidupan, tetapi aspek sosial, budaya, pendidikan, dan politik juga muncul karena perubahannya masing-masing. Presiden Jokowi mengatakan pada acara pembukaan Kongres Keempat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia bahwa bangsa Indonesia menghadapi empat tantangan, yakni pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan korupsi.

Dalam konteks globalisasi, dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa disemua tingkatan, baik secara budaya maupun ekonomi. Melalui teknologi global, bisnis transnasional, dan perdagangan internasional, dunia semakin terjalin. Globalisasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari ditingkat internasional, nasional dan regional.

Diera dan kondisi persaingan yang semakin mengglobal, sektor ekonomi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan global, karena persaingan tidak hanya terjadi antar negara (Internasional), tetapi juga antar kawasan. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini selain bersaing dalam skala global juga terkait dengan sumber daya manusia dengan skill global yang berstandar internasional.

Selain ketimpangan sosial yang semakin terlihat jelas, tantangan yang dihadapi sektor sosial budaya di Indonesia juga memiliki permasalahan utama yaitu masalah identitas bangsa. Produk globalisasi yang tak terelakkan adalah modernisasi. Dalam hali ini kondisi budaya Indonesia yang dihadapi tidak stabil karena berdampak pada perkembangan budaya bangsa Indonesia. Disisi lain, globalisasi bidang kebudayaan juga mengglobalkan kebudayaan sehingga mudah ditempati oleh dunia.

Sekaligus dibidang pendidikan, tantangan pendidikan yang menuntut reformasi pendidikan merupakan jawaban atas masalah globalisasi. Proses pendidikan di era global menjadi semakin rumit karena kebutuhan yang beragam dari berbagai kalangan. Peran pendidik sangatlah penting. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat, yang diperlukan untuk benarbenar menciptakan generasi yang

“cerdas” di era global. Bersamaan dengan itu, UNESCO menjelaskan dalam konfrensi Melbom yang diadakan di Carneiro dari tanggal 29 Maret hingga 3 April 1998, bahwa waktu yang tepat untuk mereflesikan pendidikan telah mencapai pergantian abad. Disaat yang sama, dalam menghadapi globalisasi, UNESCO meyakini bahwa setidaknya sektor pendidikan harus memenuhi tantangan melalui empat tonggak pembelajaran abad ke-21, yaitu belajar ilmu, belajar melakukan sesuatu, belajar hidup bersama dan menjadi. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia dikembangkan berdasarkan pemahaman multidimensi tentang perubahan zaman. Namun tidak hanya perubahan nama dan kemasannya saja, perubahan isi mata kuliah juga menuai banyak kritik, perubahan tersebut sering berubah, dan tentunya harus disesuaikan dengan kepentingan Negara.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah menumbuhkan kesadaran dan patriotism nasional, sikap dan perilaku, serta mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan dan keilmuwan yang berbasis pada budaya nasional, wawasan nusantara dan adaptasi nasional penerus bangsa dimasa depan. Yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang bermoral, individual, mandiri, maju, tangguh, professional, bertanggungjawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohani.

Bicara tentang paradigma pendidikan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia. Pertama, wajib memahami konsep paradigma. Dalam KBBI, *paradigm/ para dig ma/n* adalah daftar segala bentuk kata. Kata-kata tersebut merepresentasikan konjugasi dan kemiringan kata, model dalam teori ilmiah, dan kerangka pemikiran. Pada saat yang sama, Thomas Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai pengetahuan tentang kegiatan ilmiah dengan konsep, teori, alat, dan metodologi. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa paridgma tersebut berkaitan dengan model utama, pola atau metode. Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan Indonesia bertujuan untuk menggantikan paradigma lama kewarganegaraan (PPKn) yang antara lain bercirikan struktur keilmuwan yang tidak jelas dan materinya telah disesuaikan dengan

kepentingan politik rezim (ruling power). Visi penguatan pembangunan negara (kediktatoran birokrasi ;kerja sama Negara) mengakibatkan lemahnya posisi warga Negara dalam berhadapan dengan penguasa. Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan mengenai fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, materi ilmiah pendidikan kewarganegaraan meliputi tiga bagian yaitu : pengetahuan kewarganegaraan meliputi bidang politik, hukum , dan moral. Secara lebih rinci, pengetahuan hak sipil meliputi pengetahuan tentang prinsip dan prosedur demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, penegakan hukum dan lembaga peradilan yang bebas dan adil, konstitusi, sejarah nasional, serta hak dan kewajiban warga negara, hak sipil dan hak politik. Keterampilan kewarganegaraan (civic skill) mencakup komponen-komponen keterampilan yang perlu dimiliki oleh warga negara, antara lain keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan partisipasif. Ketiga, komposisi karkter warga Negara menunjuk pada karakter pribadi dan karakter sosial, yang merupakan syarat mutlak untuk pemeliharaan dan peningkatan. Demokrasi konstitusional. Komponen ini mencakup ciri-ciri karakter pribadi seperti tanggungjawab moral, disiplin diri, dan penghormatan terhadap nilai-nilai dan martabak kemanusiaan. Ciri-ciri kepribadian sosial, seperti jiwa sosial, kesopanan, penghormatan terhadap supremasi hukum, pemikiran kritis, keinginan untuk mendengarkan, bernegosiasi, dan kompromi, sangat penting untuk keberhasilan demokrasi.

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu Negara, karena kemajuan suatu Negara dapat diukur dari kemajuan pendidikannya. Pada abad 21, kemajuan teknologi yang semakin maju telah membuat kehidupan masyarakat dapat berubah dan membimbing masyarakat menjadi masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge-based society). Di masa depan, pendidikan pendidikan akan memainkan peran kunci dalam membentuk dan membangun gaya hidup setiap orang. Perubahan masyarakat akan sangat bergantung pada perubahan dibidang pendidikan.

Menghadapi era globalisasi, sektor pendidikan harus beradaptasi dan berkembang, harus menyesuaikan kurikulum, dan harus menyesuaikan dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk komonikasi global. Pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi tidak hanya perlu menjadi teori yang terpelajar, tetapi juga harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang menitikberatkan pada pembentukan diri, yang beraneka ragam dalam agama, sosial, budaya. Dan menjadi warga Negara yang cerdas dan terampil. Pendidikan kewarganegaraan termasuk mata pelajaran yang harus ada dalam pendidikan Indonesia disemua jenjang menurut Undang-Undang. Republik Indonesia Nomor 16. Mengenai Sistem Pendidikan Nasional UU No. 20 Tahun 2003, ditetapkan bahwa wajib belajar meliputi pendidikan bahasa, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan dalam segala jenis, cara, dan jenjang.

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan di era global, karena pendidikan seperti ini pada dasarnya merupakan komitmen moral yang kuat terhadap kemanusiaan global. Namun perlu diperhatikan bahwa pendidikan kewarganegaraan global harus menggambarkan moralitas kemanusiaan yang universal ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat manusia, tanpa mengambil nilai lokal Negara itu sendiri sebagai dasar kehidupan bernegara.

Dalam proses ini secara implisit dicermati bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis karakter Pancasila (role building) tidak bisa berdiri sendiri. Untuk mencapai tujuan ini,

pendidikan kewarganegaraan tidak bisa sendirian, tetapi harus bisa bekerjasama dengan mata pelajaran lain, seperti mata pelajaran agama. Disini mata pelajaran PKn menjadi landasan dan motivasi dari setiap kegiatan dan kegiatan yang ada, dan pendidik menjadi pengawas dan pengajar dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam era globalisasi, urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi bangsa merupakan model pengembangan kewarganegaraan global dan berstandar global yang berakar pada budaya dan bangsa. Namun, sekarang pendidikan kewarganegaraan tidak hanya harus dianggap sebagai mata pelajaran, tetapi juga harus dianggap sebagai kegiatan pendidikan yang komprehensif.

## KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan dalam lingkungan bahasa Indonesia merupakan upaya mempersiapkan warga dunia yang memiliki keterampilan global yang berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa. Dilihat dari situasi aktual di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menjadi mata pelajaran, tetapi juga menjadi kegiatan pendidikan komprehensif. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, warga negara yang kreatif, warga negara yang bertanggung jawab, warga negara yang cerdas, warga negara yang kritis dan warga negara yang partisipatif Kewarganegaraan yang bertanggung jawab (civic responsibility) berarti bagi diri sendiri, kepada Tuhan, dan kepada orang lain Manusia bertanggung jawab terhadap lingkungan alam. Dan dampaknya pada masyarakat, negara, dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbal, Muhammad. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*. Universitas Negeri Makassar : Fakultas Ilmu Sosial.
- Budimansyah, D. (2008). *Pendidikan Kesadaran Kewarganegaraan Multidimensional*. Bandung: Genesindo.
- Deliana, Hety. (2014). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. FKIP UMP.
- Hanna Wida. *Pendidikan kewarganegaraan dan masa depan bangsa*, Kompasiana, Mei 2018
- Harmanto. (2013). *Pengintegrasian pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran pkn sebagai penguatan karakter bangsa*. Studi evaluasi dan pengembangan perangkat pembelajaran bermodel pakem di sekolah menengah pertama. Disertasi. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Levitt, Theodore. (1986). *The Marketing Imagination*. New York: Free Press.
- M, Nurhidayah, Insya Musa. (2015). *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*. Universitas Syiah Kuala Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) : Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah.
- Maftuh, Bunyamin. (2008). *Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai*. Bandung: CV Yasindo Multi Aspek.
- Nanggala, Agil. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Multikultural*. Universitas Pendidikan Indonesia: Pendidikan

Kewarganegaraan.

- Nasution, Rosa Aulia. (2016). *Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Indonesia: Universitas Medan Area. Magister Hukum.
- Pipit Widiatmaka *Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, LPPM UNS*
- Rindjin, Ketut. *Pendidikan Pancasila (Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dan Dasar NKRI)*. Buku Ajar. Undiksha-Singaraja.
- Setiawan, Deny. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan*. Indonesia: Universitas Negeri Medan. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2013). *Pendidikan kewarga (negara) an; Pancasila, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Widiatmaka, P. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan sebagai ujung tombak pembangunan karakter bangsa*. In Bunga Rampai Pendidikan: Sumbangsih Pemikiran Anak Bangsa. Kediri: ARS.
- Winataputra, Udin Saripudin. (2008). *Multikulturalisme-Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia*. Jakarta: Guru Besar Dalam PIPS/PKn FKIP-UT dan Direktor PPs UT Jakarta.